



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 24 Januari 2014

Halaman: 1

Target PBB Kota Rp 46,7 M

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja secara simbolis, Kamis (23/1) pagi, menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) untuk tahun 2014. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Sekda Kota Jogja Dra Hj Titik Sulastri yang mewakili Walikota Drs HHaryadi Suyuti.

Acara penyerahan SPPT yang berlangsung di Ruang Utama Bawah Balai kota Jogja secara simbolis diterima oleh Lurah Suryatmajan Kecamatan Danurejan, Purwanto, dan Lurah Demangan Kecamatan Gondokusuman, Sudiono. SPPT tersebut akan mulai dibagikan kepada seluruh masyarakat Kota Jogja secara bertahap.

Pemkot Jogja menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 46,7 miliar dari subsektor pajak bumi dan bangunan. Besaran tersebut meningkat 5,6 persen dari proyeksi tahun 2013 yang saat itu ditargetkan Rp 42 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan tahun lalu melebihi target yaitu sebesar Rp 44 miliar.

Titik Sulastri ketika membacakan sambutan Walikota Haryadi Suyuti mengingatkan, kewajiban membayar pajak bukan semata-mata hanya memenuhi aturan yang berlaku dalam Undang-Undang, namun wajib pajak secara tidak langsung juga telah menunjukkan rasa kebangsaan. Hal ini karena pembangunan di semua sektor saat ini sebagian besar didanai dari pajak yang dibayarkan masyarakat. "Hal ini karena PAD dalam sektor pajak akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk layanan publik," kata Titik.

>>KEHAL 7

Target PBB

Sambungan dari hal 1

La menambahkan, sejalan dengan era otonomi daerah yang kini berlangsung, pajak daerah memegang peranan penting dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai varian pajak daerah, jika dioptimalkan mampu mengurangi ketergantungan daerah akan dana perimbangan dari pusat. "Apabila penerimaan dari sektor pajak mencapai target yang ditetapkan secara signifikan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya saat membacakan sambutan Walikota.

Diharap tepat

Titik menegaskan, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia memandang kepatuhan itu perlu diimbangi dengan profesionalisme aparatur pajak, transparansi dan akuntabilitas termasuk kecepatan penyampaian SPPT kepada masyarakat.

Untuk tahun ini terapat 91.509 lembar SPPT yang diserahkan kepada masyarakat dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar. Diharapkan target penerimaan tahun ini dapat segera terpenuhi sebelum batas akhir pembayaran PBB pada 30 September 2014.

Terpisah, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggoatno menurukan, permasalahan yang sering dihadapi saat penugutan PBB adalah adanya kecenderungan bagi wajib pajak untuk membayar PBB mendekati waktu jatuh tempo. Selain itu, adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam pembayaran serta adanya wajib pajak yang berdomisili di luar daerah menyebabkan penyampaian SPPT PBB terlambat. "Permasalahannya budaya masyarakat yang lebih suka menunda membayar pajak saat mendekati hari-hari terakhir. Ada juga wajib pajak yang jarang berada di Jogja karena tugas atau kerja di luar kota," ungkapnya. (ros)

Iq. Trihastono, S.Sos.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005